EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10200

Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat

R. Sabrina
Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Jl. Denai No.217, Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara 20371
e-mail : sabrina@gmail.com

Artikel Info

Received :
11 May 2022
Revised :
14 May 2022
Accepted :
29 June 2022

Kata Kunci :
Strategi Pembangunan Berkelanjutan, Otonomi Daerah, Partisipasi Masyarakat

Keywords :
Sustainable development strategy, regional autonomy, community participation

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana strategi pembangunan berkelanjutan di era otonomi daerah yang berbasis partisipasi masyarakat, Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan desktiriptif, data diperoleh melalui sejumlah jurnal dan hasil penelitian yang relevan serta dukungan dari buku-buku yang terkoneksi dengan focus kajian ini. Selanjutnya data yang sudah terkumpul akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan pada bagian awal tulisan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan problem yang menjadi focus dari pembangunan masyarakat yang dilakukan berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pada era otonomi daerah, partisipasi masyarakat sangat menentukan keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian, maka partisipasi masyarakat haruslah dijadikan tolak ukur dari keberhasilan pembangunan di era otonomi daerah, namun hal ini menjadi terkendala ketika dihadapkan dengan kepentingan politik dalam sistem demokrasi yang diberlakukan, sehingga diperlukan model dan strategi lain agar partisipasi masyarakat di era otonomi dalam rangka pembangunan berkelanjutan menjadi lebih kuat posisinya.

Sustainable Development Strategy in the Era of Regional Autonomy Based on Community Participation

ABSTRACT

This article describes how sustainable development strategies in the era of regional autonomy are based on community participation. The method used was a qualitative research method with a descriptive approach, data obtained through a number of journals and relevant research results as well as support from books that were connected to the focus of the study. Furthermore, the data that has been collected was then analyzed based on the problem formulation that has been determined at the beginning of this paper. The results of this study indicate that sustainable development is a problem that is the focus of community development which is carried

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10200

out based on the interests and welfare of the community itself. In the era of regional autonomy, community participation will determine the sustainability of development in various sectors. Thus, community participation must be used as a benchmark for the success of development in the era of regional autonomy, but this becomes constrained when faced with political interests in the applied democratic system, so other models and strategies are needed for community participation in the era of autonomy in the context of sustainable development which becomes a stronger position

PENDAHULUAN

Masalah pembangunan merupakan salah satu masalah sosial selama ini. Masalah ini menarik perhatian banyak kalangan, baik aspek teoritis maupun praktisnya. Pada aspek teoretis, wacana seputar pembangunan ditemukan motivasi saat menghadapi arah dunia mengenai kiblat baru, yaitu pembangunan berkelanjutan. Saat booting pada tingkat praktis, isu-isu pembangunan semakin banyak dibahas dengan munculnya masalah-masalah yang mengancam pembangunan, stabilitas dan kelangsungan hidup masyarakat internasional, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan isu-isu yang paling kritis, seperti pencemaran lingkungan (Hannan & Rahmawati, 2020).

Banyak ide pembangunan yang berbeda telah muncul, tetapi tujuannya tidak lebih dari untuk memecahkan masalah di atas. Salah satunya adalah gagasan pembangunan berkelanjutan (Sidauruk, 2018). Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan harus menjadi solusi tidak hanya dalam hal pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, tetapi juga dalam hal pemanfaatan yang berkelanjutan dengan keseimbangan antara tanggung jawab dan sifat sosial.

Di Indonesia, tanggapan dan perhatian Pemerintah terhadap Agenda *suistinable development* adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanggal 7//2017. Sesuai dengan peraturan Presiden tersebut, pemerintah ingin menyelaraskan rencana pembangunan berkelanjutan dengan rencana pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025 dan jangka menengah 2015-2019. Koordinasi ini menghasilkan banyak proyek politik yang ditargetkan berupa Rencana Aksi baik dalam ranah nasional maupun daerah (ARD) (Perdana, 2019).

Pembangunan berkelanjutan bukanlah hal baru (Fauzi & Alex, 2014). Pada saat gencarnya ide pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi dijadikan satu-satunya tujuan untuk mencapai pembangunan dengan menafikan aspek lain. Namun di era pembangunan berkelanjutan saat ini, negara harus mencapai tiga tahap pembangunan. Langkah pertama dari penelitian yang dilakukan oleh Susiana (2015) adalah keseimbangan ekologis. Kedua didasarkan pada dimensi keadilan sosial, dan ketiga, dasar kajian meliputi aspek aspirasi politik dan sosial budaya masyarakat (Suwandi & Rostyaningsih, 2012).

Ide mengenai hal ini dimulai ketika Komisi Brundland mengembangkan dan memaknai istilah pembangunan berkelanjutan. kerangkanya adalah memenuhi kebutuhan sekarang dengan tanpa mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang. Pembangunan sebagai suatu ide, prinsip, atau konsep berkaitan dengan cara implementasinya di masa yang akan datang bagi kehidupan manusia. Secara umum, pembangunan berkelanjutan mencakup

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10200

tiga aspek penting, yaitu; ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan, terutama hubungan antara lingkup lingkungan, sosial dan ekonomi. (Susiana, 2015).

Dimensi penting dari pembangunan berkelanjutan adalah penekanan pada proses partisipatif. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan bukan semata dilihat sebagai kebijakan yang dibuat oleh segelintir teknokrat dan pengambil keputusan, tetapi juga melibatkan peran penting yang dimainkan masyarakat dan minoritas di dalamnya (Sari et al., 2020). Oleh karena itu, yang penting dalam membentuk pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda dalam memutuskan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana caranya.

Teori yang dikemukakan Romer dan juga Lucas pada tahun 1980-an, dengan istilah pembangunan endogen, menandai dimulainya pemahaman baru tentang determinan pertumbuhan ekonomi jangka Panjang, sejalan dengan perkembangan dunia yang digunakan dalam proses produksi. Oleh karena itu, masalah pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijelaskan secara memuaskan oleh teori-teori neoklasik seperti pengembalian modal yang semakin berkurang, persaingan sempurna, dan teknologi eksogen dalam model pertumbuhan ekonomi (Mukhlis, 2009).

Berkaitan dengan masalah ini, maka perlu dilakukan kajian dan analisis mengenai strategi pembangunan berkelanjutan partisipatif masyarakat di era otonomi daerah melalui penguatan ekonomi kreatif berbasis local wisdom. Peraturan Daerah menetapkan pentingnya partisipasi dalam pendekatan perencanaan pembangunan. Pendekatan ini membutuhkan personil yang baik sebagai syarat perencanaan dan dokumentasi anggaran yang baik. meskipun, sumber daya manusia yang unggul mungkin sangat sulit diperoleh.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun pendekatan kajiannya adalah desktiriptif dengan jenis penelitian studi Pustaka. Secara teoritis penelitian Pustaka atau yang kerapkali disebut dengan *library research* yang menjadi bagian dari penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan dengan cara membaca dan mencatat sejumlah literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan, dengan demikian maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui sejumlah jurnal dan hasil penelitian yang relevan serta dukungan dari buku-buku yang terkoneksi dengan focus kajian ini. Selanjutnya data yang sudah terkumpul akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan masyarakat dapat dilihat dari proses perubahan dalam rangka mencapai tujuannya. Ada kegiatan pengembangan masyarakat yang lebih memprioritaskan dan focus pada proses bagaimana mencapai hasil pembangunan, dan ada juga lebih memilih sikap untuk focus pada hasil yang tampak nyata secara fisik, dari segi proses dan mekanisme perubahannya. mencapai hasil. Materi sebenarnya tidak masalah, yang penting hasilnya bisa dilihat secara fisik dalam waktu yang relatif singkat (Bahua, 2018).

Pembangunan merupakan proses yang melibatkan banyak aspek, meliputi perubahan dalam dinamika sosial, perubahan perspektif masyarakat terhadap kehidupan, dan perubahan pada sistem hukum, politik dan juga sistem pemerintahaan. Selain itu pembangunan

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10200

mencakup perubahan tingkat kesejahteraan, penghapusan ketimpangan sosial, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta penghapusan kemiskinan. Dalam proses pembangunan ini, warga negara terus berupaya untuk mencapai tujuan kesejahteraan (*short-term*) dan (*long-term*) yang mereka inginkan. (Mukhlis, 2009).

Pembangunan berkelanjutan menjadi trend yang menarik untuk dikaji dalam proses pembangunan saat ini. Semua sumber daya yang dimiliki negara akan dilibatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunannya (Hannan & Rahmawati, 2020). Pemanfaatan sumber daya tersebut, terlihat bahwa peran lingkungan menjadi penting untuk dipertimbangkan. Perlakuan ekonomi yang berlebihan justru dapat menimbulkan efek eskternal negatif yang dapat merusak pembangunan itu sendiri (Fauzi & Alex, 2014).

Pada wilayah ini teori endogenous growth model telah menjelaskan arah dan tujuan pembangunan berdasarkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, kualitas sumber daya manusia yang ada harus mengacu pada pemahaman yang holistic terhadap lingkungan dalam rangka menjaga sumber daya alam yang dimiliki (Mukhlis, 2009).

Target pembangunan berkelanjutan mencakup upaya untuk mencapai beberapa hal utama, yang meliputi persamaan dari manfaat ekuitas intergenerasi, yang bermaksud penggunaan sumber daya alam guna kepentingan pembangunan harus memperhatikan batas yang wajar dalam mengontrol ekosistem atau sistem lingkungan dan diarahkan ke sumber daya alam yang dapat diganti dan menekankan serendah mungkin. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak sederhana (Henry, 2014). Kemudian melindungi pelestarian sumber daya alam yang ada dan lingkungan serta pencegahan gangguan ekosistem untuk memberikan garansi kualitas hidup yang tetap baik untuk generasi mendatang. Selanjutnya penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kelanjutan pertumbuhan ekonomi dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi. Meningkatkan kesejahteraan berkelanjutan hari ini maupun di masa depan (*intertemporal*). Menjaga keunggulan dan pengembangan atau pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang mempengaruhi keberlanjutan antar generasi. Terakhir, menjaga kualitas atau kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Sementara prinsip pembangunan berkelanjutan adalah pemerataan yang berkeadilan sosial. Prinsip pertama ini berarti bahwa proses pengembangan harus selalu menjamin distribusi sumber daya alam dan lahan yang sama untuk generasi saat ini dan generasi mendatang. Pengembangan juga harus menjamin kesejahteraan semua tingkatan masyarakat; demikiain juga prinsip kedua yang menghargai keanekaragaman (Syam et al., 2020). Keanekaragaman hayati dan budaya harus dipertahankan untuk memastikan keberlanjutan biologis terkait dengan keberlanjutan sumber daya alam, dan perlakuan yang setara secara keseluruhan;

Pembangunan berkelanjutan memberikan prioritas pada hubungan antara manusia dan alam. Di mana manusia dan alam adalah elemen yang tidak bisa tetap sendirian, dalam perspektif jangka panjang, dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan difokuskan pada pembangunan tidak hanya hari ini, tetapi juga masa depan. Untuk menjamin generasi berikutnya, agar mendapatkan kondisi lingkungan yang lebih baik.

Partisipasi Masyarakat di Era Otonomi Daerah

Harus dipahami bahwa regulasi mengenai pembangunan di era otonomi daerah dan tujuan perencanaan pembangunannya adalah terwujudnya pembangunan dalam rangka

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10200

pemerataan akses pembangunan sebagai konsekwensi peningkatan kesjahteraan masyarakat, lapangan kerja, dan peningkatan akses serta kualitas layanan bagi masyarakat termasuk juga daya saing daerah (Hannan & Rahmawati, 2020). Pembangunan daerah melalui pendekatan *local wisdom* di tujukan agar dapat memberikan ruang gerak yang luas bagi daerah dalam mengeksplorasi setiap kekayaan yang ada di daerah masing-masing, serta dapat memberi peran signifikan dalam menguatkan sistem otonomi daerah.

Tujuan dari rencana otonomi daerah pada hakikatnya adalah untuk mempercepat pembangunan daerah, baik dalam bidang kesejahteraan maupun ekonomi. Demikian juga untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang ada, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi serta respon pelayanan. Potensi kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Dalam Pasal 1 Bagian 5 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan pemerintahan sendiri masyarakat setempat mematuhi hukum dan peraturan. Namun desentralisasi juga diharapkan lebih dekat masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, selama ini belum ada memiliki dampak nyata pada perubahan besar dalam manufaktur merpartisipasi dalam kebijakan.

Sesungguhnya desentralisasi merupakan keputusan yang dipilih dan dianggap terbaik bagi Indonesia, dimana saat itu ide-ide bentuk sistem pemerintahan berkembang pada awal era reformasi, sehingga pada akhirnya mengambil pilihan dengan konsep Otonom bagi daerah yang ada, para ekpert menyebutkan bahwa itu terdapat ragam faktor mengapa otonomi diperlukan, antara lain karena desentralisasi memberikan pemahaman kepada publik, pemilihan perwakilan orang dan urgensi kebijakan, perencanaan dan anggaran dalam sistem demokrasi.

Pengembangan kebijakan desentralisasi dengan semua variannya, khususnya otonomi khusus, membutuhkan dukungan peraturan yang sesuai sebagai dasar untuk mengembangkan wilayah tersebut. Implementasi otonomi khusus harus adaptif dan partisipatif tentang peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu, efektivitas dan efisiensi pengembangan sumber daya pemerintah dan alokasi sumber daya pembangunan mencakup alokasi anggaran untuk SDM dan dana pembangunan (Rusastra, 2015). Implementasi dan keberhasilan implementasi Otonomi Daerah membutuhkan penguatan aspek peraturan dan memperkuat efisiensi dan efisiensi kebijakan fiskal termasuk anggaran rutin dan manfaat pembangunan dalam kerangka percepatan pengembangan masyarakat dan kesejahteraan di wilayah otonomi.

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa desentralisasi menciptakan dasar bagi kemungkinan pemimpin, baik gubernur maupun bupati atau walikota pada tingkat lokalistik untuk mengembangkan model dan desain dalam hal perumusan kebijakan, dan menyusun anggaran. Diharapkan bahwa tingkat lokal ini dapat melahirkan politisi nasional yang andal.

Selain itu, keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan politik dengan sistem pemungutan suara secara langsung bisa menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat. Melalui cara ini, dapat diharapkan bahwa mereka mencapai keharmonisan sosial, semangat gotong royong, dan harmoni, juga stabilitas politik. Pada aspek kesetaraan dan partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan (Purwadi, 2013) kekuatan politik akan didistribusikan secara luas sehingga desentralisasi adalah mekanisme yang dapat merangkul kelompok miskin atau marjinal.

Diskursus lainnya menegaskan bahwa pada era otonomi daerah, tanggung jawab pemimpin daerah diperkuat dengan pemantauan dari masyarakat, karena perwakilan lokal

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10200

lebih mudah diakses oleh penduduk setempat. Oleh karena itu, akan lebih bertanggung jawab atas kebijakan yang telah ditetapkan (Kementerian PPN, 2020). Demikian juga mengenai sensitivitas pemerintah, pada era ini akan meningkat sistem perwakilan pada DPRD yang ditempatkan secara memadai untuk menentukan kebutuhan lokal dan juga sehingga kebutuhan tersebut terpenuhi secara efektif.

Sehubungan dengan ini, dapat dipahami bahwa pembangunan berkelanjutan di era otonomi daerah juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dapat difahami sebagai instrumen yang menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai objek dari pembangunan itu sendiri, melainkan juga harus di posisikan sebagi subjek yang akan melahirkan produk pengembangan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat menjadi lebih diperhatikan oleh pemegang kebijakan dilevel pemerintahan (Bahua, 2018).

Keterlibatan unsur masyarakat dalam pembangunan yang sebenarnya membutuhkan metode dan strategi yang tepat agar hasil pembangunan lebih efektif dan efisien. Penyusunan dan penggunaan metode dan strategi pembangunan, baik masyarakat maupun pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan hasil pembangunan, menentukan peran masing-masing pihak dan memungkinkan kedua belah pihak memainkan peran yang optimal dan sinergis, saya akan mampu melakukannya.

Seorang ilmuwan bernama Keith Davis mengemukakan pengertian dari partisipasi sebagai keterlibatan mentalitas, moralitas atau perasaan dalam kelompok yang mendorong mereka memberikan kontribusi kepada organisasi dan juga bertanggung jawab atas upaya tersebut. Ini artinya, partisipasi tidak didasarkan pada keterlibatan fisik dalam pekerjaannya, tetapi menyangkut keterlibatan diri orang tersebut sehingga mengarah pada tanggung jawab dan kontribusi besar (Makhmudi & Muktiali, 2018).

Dari penjelasan tersebut, sangat jelas diketahui bahwa partisipasi menyangkut partisipasi diri dan tidak mesti terlibat secara fisik (meskipun hal ini tidak bisa dipungkiri juga akan terjadi), dan tiga elemen partisipasi dalam kenyataannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi akan mendukung. Bahkan, terutama dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, istilah partisipasi sering dikaitkan dengan upaya untuk mendukung program pembangunan (Suharto, 2014). Hal ini bertujuan guna mencapai keberhasilan pembangunan, semua program perencanaan, implementasi dan evaluasi kontrol dari proses pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena mereka adalah yang mengetahui masalah dan perlu membangun wilayah mereka dan juga akan menggunakan dan mengevaluasi kurangnya pembangunan di wilayah mereka.

Melalui partisipasi masyarakat, pemerintah dapat menyerap aspirasi seluruh masyarakat sesuai dengan rencana yang dilaksanakan. Cara suatu negara berkembang dengan memberdayakan masyarakatnya adalah dengan menjadikan masyarakat sebagai aktor dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan kemajuan teknologi yang menuntut partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan media sosial secara bijak dan bijak untuk membantu pemerintah memimpin pembangunan negara. Kemampuan masing-masing anggota masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan arah dan strategi pembangunan, hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dalam perencanaan dan keterlibatan mereka serta kesesuaian penerapan kebijakan pembangunan (Renoati, 2003).

Asumsi ahli menegaskan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maka tentunya juga akan memberikan hasil lebih optimal. Semakin tinggi

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10200

volume partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan dan peluang keberhasilan yang dicapai (Nurwanda, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah instrumen utama dan vital dalam penentuan keberhasilan pembangunan. Pendapat atau teori dapat diterima secara rasional karena tujuan pengembangan yang baik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga sangat cocok untuk orang yang terlibat.

Untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi obyektif yang ada, partisipasi masyarakat pada berbagai tahap pembangunan adalah suatu keharusan (Zaili et al., 2020). Partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat tersebut dapat ditinjau dalam dua hal utama, yaitu pada perencanaan dan pada pelaksanaan. Proses perencanaan perlu diperhatikan resiko yang seringkali terjadi adalah ketiadaan jaminan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah benar-benar mewakili masyarakat, atau sekedar klaim sepihak, jika hal ini diabaikan maka akan muncul gejolak di tengah-tengah masyarakat. Hal kedua adalah dalam pelaksanaan, pada situasi ini agar dipetakan potensi eksploitasi, di mana penduduk hanya digunakan sebagai pembangunan tanpa didorong untuk memahami dan menyadari masalah yang mereka hadapi dan tanpa keinginan untuk menyelesaikan masalah.

Paling tidak, ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan menyajikan properti yang sangat penting (Henry, 2014): Pertama, pelibatan masyarakat merupakan sarana dalam menggali dan memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Kedua, publik akan mempercayai program kegiatan pengembangan jika mereka terlibat dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan menemukan lebih banyak program yang digagas serta memiliki perasaan memiliki dalam diri mereka. Ketiga. Dukungan partisipasi umum karena hipotesis akan menjadi hak demokratis jika masyarakat terlibat dalam pengembangan.

SIMPULAN

Pembangunan yang berkelanjutan atau *suistinable development* merupakan gagasan yang sejak awal menargetkan bahwa setiap komponen dari proses pembangunan harus dipertegas keterlibatannya, dalam hal pembangunan di era otonomi daerah. Keterlibatan publik harus menjadi nilai tambah untuk mengukur keberhasilan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keterlibatan masyarakat disini tidak secara harfiah diartikan dalam bentuk keterlibatan secara fisik dalam melaksanakan pembangunan, namun harus dimaknai dengan kontribusi ide dan gagasan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diorientasikan pada keberhasilan dari perencanaan pembangunan pada setiap periode kepemimpinan daerah di era otonomi daerah. Hal ini penting untuk dilakukan, karena dengan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan ini, berarti juga menjaga agar hasil dari pembangunan tidak hanya diperuntukkan bagi generasi saat ini, melainkan juga bagi generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Bahua, M. I. (2018). Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat. In *Gorontalo: Ideas Publishing*. https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/2442/mohamad-ikbal-bahua-buku-perencanaan-partisipatif-pembangunan-masyarakat.pdf.

Fauzi, A., & Alex, O. (2014). Pergerakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. In *Mimbar* (Vol. 30, Issue 1, pp. 45–52). https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/445/759.

Hannan, A., & Rahmawati, F. (2020). Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah Berkelanjutan Melalui Konsep Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia , respon dan perhatian pemerintah terhadap agenda 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan kebijakan yang lebih terfo. *Entita*, *2*(1), 97–119.

Henry. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, *Volume 2*(Desember 2014), 118.

Kementerian PPN. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). *Kementerian PPN*.

Makhmudi, D. P., & Muktiali, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Plpbk Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, *6*(2), 108. https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108-117.

Mukhlis, I. (2009). Eksternalitas , Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, *3*, 191–199.

Nurwanda, A. (2018). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *4*(2), 28–39.

Perdana, F. R. (2019). Ketahanan Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Penunjang Industri Kreatif Pariwisata. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *5*(2), 1–13. https://doi.org/10.30738/sosio.v5i2.4730.

Purwadi, A. (2013). Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah. *Perspektif*, *18*(2), 86. https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.117

Renoati, R. (2003). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Era Otonomi Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. In *Mimbar Hukum* (Vol. 3, Issue 43, pp. 101–115). http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2808

Rusastra, I. W. (2015). *Arah kebijakan pembangunan Daerah, Peran Legislasi, Apsek Tematik dan Pemerataan* (Issue April). P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.

Sari, E., Ginting, B., Perencanaan, M., Teknik, F., & Mada, U. G. (2020). *SUMATERA UTARA : PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DALAM DIKOTOMI SPASIAL DAN NON SPASIAL NORTH SUMATRA : DEVELOPMENT OF REGIONAL POTENTIAL IN SPATIAL AND NON-SPATIAL DICHOTOMIES PENDAHULUAN Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pembangunan dae*. *3*(2).

Sidauruk, R. (2018). Ekonomi Kreatif Sebagai Basis City Branding Menuju Kepariwisataan Terintegrasi Di Kawasan Danau Toba (Creative Economy As Basis of City Branding Toward Integrated Tourism in Toba Lake Zone). *Inovasi*, *15*(2), 83–104. https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i2.95.

Suharto, E. (2014). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunn. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*, *3*(2), 1–14.

Susiana, S. (2015). *PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN :* (Suli Susiana (ed.)). P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.

Suwandi, & Rostyaningsih, D. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. *Journal of Public Policy and Management Review*, *1*(2), 261–270.

Syam, M. A., Djaddang, S., Salim, F., & Rachbini, W. (2020). Kick Off Peningkatan Potensi

Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Koperasi, Bumdes dan UKM Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Soppeng. *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(01), 1–11. https://doi.org/10.35814/capacitarea.v1i01.1340

Zaili, R., Adianto, & Dadang, M. (2020). Pembangunan Berkelanjutan Dalam Bingkai Otonomi Daerah. In *Taman Karya*. TAMAN KARYA.